

TRANSFORMASI NILAI DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITAL

Apriana Manalu¹, Jeliana Situmorang², Eva M.Banjar Nahor³, Theresia Simbolon⁴, Aurelius Pasaribu⁵, Fita Angrayni⁶, Esra Gultom⁷

Universitas HKBP Nommensen PematangSiantar

e-mail: aprianamanalu2@gmail.com¹, jelianasitumorang@gmail.com²,
evambanjarnahor1823@gmail.com³, theresia13simbolon@gmail.com⁴,
aureliusbinsar@gmail.com⁵, fitaangrayni@gmail.com⁶, gultomesra120@gmail.com⁷

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2025-7-31
Review : 2025-7-31
Accepted : 2025-7-31
Published : 2025-7-31

KATA KUNCI

Pendidikan, Kewarganegaraan, Era Digital.

A B S T R A K

Dalam era digital saat ini, kewarganegaraan menjadi semakin penting sebagai bagian integral dari identitas individu dan masyarakat. Untuk memperkuat jiwa kewarganegaraan di era digital ini, diperlukan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat digital saat ini. Abstrak ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif dalam memperkuat jiwa kewarganegaraan di era digital, serta memberikan pandangan tentang bagaimana hal ini dapat dicapai melalui pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif. Selain itu juga membahas tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran warga negara terhadap lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Dalam era digital yang semakin berkembang, pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif menjadi hal yang krusial untuk melindungi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif berfokus pada pembentukan karakter dan sikap positif warga negara yang terintegrasi dengan teknologi dan informasi yang ada. Melalui pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif, generasi muda akan menjadi penerus bangsa yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam membangun kesadaran dan partisipasi aktif dalam demokrasi yang responsif dan inklusif dalam pemanfaatan teknologi dan informasi.

ABSTRACT

In today's digital age, citizenship is becoming increasingly important as an integral part of individual and societal identity. To strengthen the civic spirit in this digital era, a comprehensive civic education is needed that is able to address the challenges faced by today's digital society. This abstract aims to explain the importance of comprehensive citizenship education in strengthening the civic spirit in the digital era, as well as provide a view on how this can be achieved through

Keywords: Education, Citizenship, Digital Age.

comprehensive citizenship education. It also discusses the importance of civic education in increasing citizens' concern and awareness of the social, political and economic environment. In the growing digital era, comprehensive civic education is crucial to protect the rights and obligations of citizens. Comprehensive civic education focuses on building positive character and attitudes of citizens that are integrated with existing technology and information. Through comprehensive civic education, the younger generation will become the nation's successors who have the ability and skills to build awareness and active participation in a responsive and inclusive democracy in the use of technology and information.

PENDAHULUAN

Kita hidup di era yang ditandai oleh ledakan teknologi digital suatu fenomena revolusioner yang tidak hanya mengubah alat, tetapi juga cara berpikir, berinteraksi, dan menjadi manusia. Digitalisasi telah menjelma menjadi kekuatan struktural yang memengaruhi fondasi kehidupan warga negara: dari identitas pribadi hingga bentuk partisipasi sosial dan politik. Dalam ruang digital, batas antara publik dan privat semakin kabur, sementara kecepatan informasi melampaui kecepatan refleksi. Perubahan pola hidup tidak lagi bersifat gradual, tetapi disruptif. Aktivitas manusia berpindah dari ruang fisik ke ruang virtual: belanja daring menggantikan pasar tradisional, pendidikan jarak jauh menantang makna ruang kelas, pelayanan publik beralih ke e-government, bahkan hubungan sosial kini dibangun dan diwarnai oleh algoritma media sosial.

Namun, transformasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah perubahan ini memperkuat martabat warga negara, atau justru mengaburkannya? Di tengah kenyamanan teknologi, muncul kekhawatiran akan alienasi sosial, kesenjangan digital, bahkan manipulasi informasi yang mengancam kesadaran kritis warga negara. Apakah akses informasi menjamin kebijaksanaan, atau hanya mempercepat penyebaran disinformasi? Di sisi lain, digitalisasi menawarkan peluang emansipatoris. Ia membuka akses pendidikan, memungkinkan kolaborasi lintas batas, serta memperluas ruang bagi warga untuk menyuarakan aspirasi. Namun, peluang ini hanya dapat dimaknai secara utuh apabila disertai dengan etika digital, literasi kritis, dan komitmen pada nilai-nilai keadaban digital (digital civility). Karenanya, perubahan pola hidup akibat digitalisasi bukan semata-mata perubahan teknologis, melainkan transformasi kultural dan spiritual yang menantang cara kita memahami manusia, masyarakat, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Namun, ada beberapa kesenjangan pada pendidikan kewarganegaraan yang perlu diperhatikan. Beberapa kesenjangan tersebut antara lain: Tidak semua sekolah memberikan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif. Beberapa sekolah bahkan tidak mengajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang kurang memadai. Beberapa kurikulum hanya membahas hal-hal yang umum saja, seperti sejarah dan konstitusi, namun tidak memberikan pemahaman yang cukup tentang nilai-nilai kewarganegaraan. Tidak semua siswa mampu mengakses teknologi untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan. Keresahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya kewarganegaraan dalam era digital, di mana teknologi

semakin mempengaruhi cara kita berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (Santoso, Damayanti, et al., 2023). Selain itu, masih banyak sekolah dan institusi pendidikan yang kurang memperhatikan pentingnya pendidikan kewarganegaraan, sehingga siswa tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik dan berperan aktif dalam pembangunan negara. Hal ini dapat mengancam stabilitas sosial dan memperburuk kesenjangan sosial.

Tujuan dari memperkuat jiwa kewarganegaraan di era digital dengan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Santoso, Karim, et al., 2023c). Dengan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif juga bertujuan untuk membantu masyarakat menghadapi tantangan yang muncul di era digital, seperti penyebaran informasi palsu dan radikalisme. Juga untuk membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memahami peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif juga bertujuan untuk membentuk karakter yang baik, seperti berintegritas, memiliki rasa empati, berpikir kritis, dan kreatif. Dengan memperkuat jiwa kewarganegaraan, diharapkan dapat membentuk generasi muda yang berkualitas dan memiliki kontribusi positif dalam membangun bangsa dan negara di era digital ini.

Ada beberapa alasan mengapa perlu memperkuat jiwa kewarganegaraan di era digital dengan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif (Santoso, Karim, et al., 2023a). Pertama, era digital membawa dampak yang signifikan terhadap perilaku dan pola pikir masyarakat, sehingga dilakukan upaya untuk membentuk jiwa kewarganegaraan yang kuat agar masyarakat tetap memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap negara dan sesama. Kedua, pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif dapat membantu mengurangi masalah sosial yang semakin kompleks di era digital, seperti polarisasi politik, ujaran kebencian, dan radikalisme. Ketiga, memperkuat jiwa kewarganegaraan juga dapat membantu memperkuat kedaulatan negara melalui kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Keempat, tantangan di era digital yang semakin kompleks: Dalam era digital yang terus berkembang, tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat semakin kompleks. Oleh karena itu, adalah sangat penting bagi pendidikan kewarganegaraan untuk mempersiapkan warga negara secara komprehensif agar mereka dapat menghadapi tantangan ini dengan pemahaman yang baik dan mendalam. Kelima, Memperkuat kesadaran kewarganegaraan: Pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif dapat membantu memperkuat kesadaran kewarganegaraan dalam masyarakat. Ini adalah kunci penting dalam membangun masyarakat yang baik dan harmonis. Keenam, Meningkatkan partisipasi warga negara: Dengan memperkuat jiwa kewarganegaraan. Di era digital saat ini, siswa sebagai generasi muda menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam ruang-ruang digital seperti media sosial, forum daring, dan platform diskusi publik. Mereka aktif mengomentari isu-isu sosial, politik, dan budaya yang sedang berkembang, serta menunjukkan antusiasme dalam menyuarakan pendapat secara terbuka. Namun, fenomena ini tidak selalu dibarengi dengan pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai demokrasi yang mendasari kebebasan

berekspresi. Dalam praktiknya, tidak jarang kebebasan berpendapat yang diekspresikan siswa di media sosial justru mengarah pada ujaran kebencian, penyebaran hoaks, hingga perundungan digital. Fenomena lain yang mengemuka adalah rendahnya toleransi terhadap perbedaan pendapat, yang tercermin dalam perdebatan di ruang digital yang cenderung biner dan agresif, bukan dialog demokratis yang sehat. Partisipasi mereka cenderung bersifat spontan dan reaktif, bukan reflektif dan bertanggung jawab sebagaimana idealnya dalam demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi mengalami pergeseran bentuk atau transformasi, dari yang semula berbasis deliberasi dan etika menjadi ekspresi digital yang kurang terkendali. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk hadir sebagai wadah pembentukan warga negara digital yang tidak hanya aktif, tetapi juga sadar akan hak, tanggung jawab, dan etika dalam berdemokrasi di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, karena bertujuan menjelaskan konsep dan fenomena secara mendalam, khususnya terkait dengan transformasi nilai demokrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan di era digital.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku teori, dokumen kebijakan pendidikan, serta artikel ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan menelaah secara tematik literatur-literatur yang berkaitan dengan perubahan bentuk partisipasi demokrasi, strategi pembelajaran PPKn di era digital, serta tantangan dan peluang yang muncul dari digitalisasi pendidikan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konseptual yang mendalam mengenai pentingnya integrasi nilai demokrasi dan literasi digital dalam pembelajaran Kewarganegaraan saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Demokrasi

Pendidikan ialah sarana guna membangun dan mengaktifkan nilai sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai kompetensi sosial dan pengembangan pribadi serta membina hubungan yang kokoh antara individu, masyarakat, dan lingkungan sekitar tempat ia tinggal. Dengan kata lain, pendidikan ialah suatu proses memanusiakan manusia yang mempunyai makna bahwa individu harus dapat memahami dirinya sendiri, orang lain, serta lingkungan alam kebudayaannya. Dengan demikian, kekuasaan sebenarnya berasal dari rakyat, dan rakyatlah yang menentukan dan mengatur kehidupan Negara (Prasisko, 2019).

Demokrasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam system pemerintahan, meskipun pelaksanaannya masih berbeda-beda di setiap negara. Ini mencerminkan keputusan mayoritas yang diberikan kebebasan oleh warga negara. Demokrasi dianggap sebagai kekuasaan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Pendidikan demokratis ialah proses yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi diri manusia yang menghargai keragaman serta perbedaan sebagai hasil dari ragam budaya, etnis, dan agama. Nilai paling utama yang ditekankan dalam Pendidikan demokratis adalah kesetaraan dan toleransi (Siska et al., 2021). Pendidikan demokrasi merupakan sebuah

usaha yang terencana dilakukan negara dan masyarakat agar dapat mengenal, merasakan, menerapkan, mengembangkan konsep, serta nilai demokrasi sesuai dengan status dan peran dalam masyarakat.

Pendidikan dalam sistem demokratis memiliki peran penting. Tujuan dari pendidikan ialah untuk mengajarkan warga negara mengenai nilai dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil. Sekolah berfungsi sebagai tempat proses ini berlangsung secara resmi dan mencerminkan upaya guna mendidik warga negara menuju sebuah masyarakat sipil yang mendukung pelaksanaan demokrasi, dimulai dari lingkungan sekolah (Rizki Ramdani, 2021). Perkembangan dalam era digital juga berkembang dengan sangat cepat sehingga manusia tidak bisa berhenti mengikutinya. Ini terjadi sebab manusia pada dasarnya menginginkan sesuatu yang lebih mudah dan praktis. Dalam era digital yang terus melaju pesat, teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai segi kehidupan, termasuk dalam hal demokrasi. Kemajuan pesat dalam era digital tentunya membawa berbagai konsekuensi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan media sosial, telah menyebabkan akses terhadap informasi yang sebelumnya tidak pernah terjadi (Wilujeng, 2014).

Generasi digital merupakan era dimana teknologi akan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengaruh industri digital pada akhirnya akan berdampak pada seluruh bidang industri. Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan digital akan mampu membantu semua jenis usaha atau kegiatan baru yang dapat meningkatkan perekonomian. Meski begitu, ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui apa yang harus dilakukan dengan kemajuan dunia digital saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia juga harus bias mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa mengikuti apa yang terjadi saat ini. Era digital seperti saat ini tidak hanya memberikan manfaat saja, namun era digital juga menghadirkan tantangan tersendiri yang harus di hadapi setiap orang dalam beradaptasi dengan perkembangan saat ini.

Krisis demokrasi dalam era digital menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia. Meskipun teknologi informasi dan media sosial telah meningkatkan akses informasi dan interaksi antar individu secara global, dampak terhadap proses demokrasi juga menimbulkan tantangan serius. Krisis demokrasi di era digital menghadirkan tantangan kompleks dan unik dalam pengelolaan informasi. Era digital telah mengubah cara orang mengakses, menyebarkan, dan mengonsumsi informasi secara drastis. Meskipun teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan akses lebih luas terhadap informasi, hal ini juga membawa risiko baru, seperti penyebaran berita palsu (hoaks), propaganda politik, dan penggunaan data pribadi untuk manipulasi politik. Salah satu tantangan utama dalam mengelola informasi di era digital adalah penyebaran berita palsu atau hoaks (Ade Wahyudi 2022). Di era digital, pola interaksi warga negara mengalami pergeseran yang signifikan. Kehidupan politik tidak lagi hanya berlangsung dalam forum fisik seperti rapat, diskusi kelas, atau media cetak, tetapi telah bergeser ke ruang-ruang digital yang bersifat instan dan interaktif. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X menjadi wadah baru bagi warga negara, termasuk pelajar, untuk menyampaikan opini, mendebatkan isu publik, dan membangun kesadaran politik. Budaya partisipasi digital yang tumbuh dari fenomena ini menandakan bahwa demokrasi telah menemukan bentuk ekspresinya yang baru: lebih cepat, terbuka, dan mudah dijangkau. Namun, kemudahan ini juga menyimpan sisi gelap berupa polarisasi, provokasi, serta banjir informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Euforia kebebasan berekspresi sering

kali tidak diimbangi dengan kedewasaan dalam menyaring informasi dan menghargai perbedaan. Ruang demokrasi yang seharusnya sehat dan terbuka pun kerap berubah menjadi arena konflik dan perpecahan opini akibat minimnya literasi digital dan etika bermedia.

Kondisi ini menempatkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam posisi strategis untuk mengembangkan pendekatan baru yang mampu menjawab tantangan zaman. Pembelajaran yang bersifat satu arah, berpusat pada guru, dan berorientasi pada hafalan kini semakin kehilangan daya tariknya di tengah generasi yang hidup dalam dunia visual dan interaktif. Oleh karena itu, strategi pembelajaran PPKn perlu ditransformasi melalui pemanfaatan teknologi digital yang lebih kreatif dan partisipatif. Integrasi media pembelajaran seperti Learning Management System (LMS), video interaktif, platform media sosial, serta penggunaan gamifikasi terbukti mampu meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam memahami isu-isu demokrasi. Peran guru pun harus bergeser dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator pembelajaran demokratis berbasis digital yang mampu membimbing siswa berdiskusi, berpikir kritis, dan menyusun opini dengan etika. Melalui pendekatan ini, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menjadi mata pelajaran yang informatif, tetapi juga transformatif, karena melatih siswa menjalankan peran sebagai warga negara yang sadar nilai dan aktif secara digital.

Namun, proses transformasi ini tentu tidak bebas dari tantangan. Salah satu persoalan mendasar adalah masifnya penyebaran disinformasi yang sulit dibendung di ruang digital. Siswa yang belum memiliki kemampuan literasi digital yang baik sangat rentan menjadi korban ataupun pelaku dalam menyebarkan informasi yang salah, baik secara tidak sengaja maupun karena pengaruh lingkungan digital yang permisif. Selain itu, rendahnya kesadaran terhadap etika bermedia juga menyebabkan interaksi digital dipenuhi oleh ujaran kebencian, fitnah, dan intoleransi. Di sinilah pentingnya menanamkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai warga digital. Sebaliknya, di tengah tantangan tersebut terdapat pula peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Teknologi digital membuka ruang partisipasi yang luas bagi pemuda untuk mengambil peran aktif dalam kehidupan politik dan sosial, mulai dari membuat konten edukatif, membangun komunitas digital, hingga mengorganisir gerakan sosial lintas batas budaya. Kolaborasi digital semacam ini bahkan dapat menjadi sarana penguatan nilai toleransi, keberagaman, dan empati—nilai-nilai yang menjadi inti dari demokrasi itu sendiri. Transformasi nilai demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan di era digital menunjukkan bahwa perubahan tidak bisa dielakkan. Demokrasi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang mengikuti pola komunikasi dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan harus menjadi ruang pembelajaran yang dinamis dan adaptif, tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga menyiapkan peserta didik untuk menghadapi realitas digital yang kompleks. Dengan mengembangkan pendekatan pembelajaran yang berbasis teknologi, mengintegrasikan literasi digital dan etika media, serta memperkuat peran guru sebagai fasilitator nilai, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi kekuatan utama dalam membentuk generasi warga negara digital yang demokratis, toleran, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Transformasi nilai demokrasi di era digital menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang statis, melainkan suatu proses dinamis yang terus beradaptasi

dengan perkembangan zaman, termasuk kemajuan teknologi informasi. Perubahan pola interaksi warga negara dari ruang fisik ke ruang digital telah menciptakan bentuk baru partisipasi politik yang lebih terbuka dan cepat, namun juga menghadirkan tantangan serius dalam hal literasi informasi dan etika bermedia. Budaya partisipasi digital yang berkembang saat ini perlu diimbangi dengan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai demokrasi agar tidak terjebak dalam euforia kebebasan yang tanpa tanggung jawab.

Dalam konteks ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memegang peran yang sangat penting untuk membekali peserta didik dengan kompetensi kewarganegaraan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Transformasi strategi pembelajaran melalui integrasi teknologi seperti LMS, media sosial, dan gamifikasi memungkinkan siswa tidak hanya memahami demokrasi secara teoritis, tetapi juga menghayatinya dalam praktik kehidupan digital mereka. Guru dituntut menjadi fasilitator aktif yang mampu membimbing siswa membangun kesadaran kritis, empati, serta tanggung jawab sosial di ruang digital.

Meskipun terdapat tantangan berupa disinformasi, polarisasi, dan rendahnya etika digital, era digital juga membuka peluang besar untuk memperluas ruang demokrasi melalui partisipasi aktif pemuda dan kolaborasi lintas budaya. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai demokrasi dengan literasi digital melalui pembelajaran PPKn merupakan langkah strategis untuk membentuk warga negara digital yang cerdas, toleran, dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan di era digital harus mampu menjadi jembatan antara perkembangan teknologi dan penguatan nilai, sehingga mampu menjaga keberlanjutan demokrasi dalam dunia yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Belawati, T. (2019). *Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Budimansyah, D. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembangunan Demokrasi*.
- Gašević, D., Siemens, G., & Sadiq, S. (2023). *Learning Analytics: Enhancing Education in a Digital Age*. Springer.
- Hobbs, R. (2017). *Create to Learn: Introduction to Digital Literacy*. Wiley.
- Nugroho, H., & Sihombing, R. (2021). Media Sosial, Literasi Digital, dan Ketahanan Demokrasi. *Jurnal Politik Profetik*, 9(1), 22–34.
- Rheingold, H. (2012). *Net Smart: How to Thrive Online*.
- Ribble, M. (2011). *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know*. ISTE.
- Setyowati, D. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Etika Digital di Kalangan Pelajar. *Jurnal Civic Education Research*, 5(2), 55–64.
- Sihombing, R. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan dan Nilai-nilai Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 22(4), 471–485.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Winataputra, U. S. (2011). Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep dan Pembelajaran. *Jurnal Civicus*, 1(1), 1–12.